

BERNAS

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Ada Kelompok yang Sengaja Dikirim

* Dr Ariei Heryanto tentang Kerusuhan Mei

Yogya, Bernas

Salah besar kalau orang menilai kerusuhan di Jakarta, Solo dan tempat-tempat lain beberapa waktu lalu sebagai kerusuhan rasial. Sebab, kerusuhan itu merupakan sebuah upaya terorganisasi dari kelompok tertentu untuk membelokkan inti persoalan yang selama ini dihadapi.

"Ada pembelokan persoalan. Dan, ini disengaja karena akan aman bagi pelakunya. Yang sekarang dituduh dan diasumsikan pelakunya adalah massa, atau orang miskin. Itu nggak betul!" papar Dr Ariei Heryanto, staf pengajar di Program Studi

Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura di Yogyakarta, Kamis (25/6).

Karena itu, kata Ariel, yang mendesak dijelaskan adalah adanya kelompok terorganisasi di balik kerusuhan tersebut. "Ada kelompok yang sengaja dikirim. Itu bukan ras, kan?" ujarnya.

"Saat ini, tampaknya sudah ada semacam petunjuk yang sangat halus bahwa itu adalah kerjaan orang-orang militer. Orang mulai bongkar dikit-dikit," lanjut mantan staf pengajar UKSW Salatiga ini.

Persoalan rasial, termasuk

kasus perkosaan masal dalam kerusuhan terhadap kelompok etnis minoritas, dalam pandangan Dr Ariei Heryanto, memang ada dan tak perlu ditutup-tutupi. Namun sangat keliru jika masalah dan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia selalu ditimpakan kepada sekelompok kaum minoritas saja.

"Dalam kasus seperti ini, masalah ras tak inheren (berkait langsung-red). Persoalan ekonomi tak ada hubungannya dengan ras, meski akhirnya dikaitkan. Pikir saja, orang

Bersambung ke hal. 7 kol. 6

Ada Kelompok - - -

Sambungan dari hal. 1

nginjak-injak orang miskin itu jelas bukan persoalan rasial. Galibnya orang berkuasa, ya seperti itu!" ujarnya tegas.

Pada hari yang sama, Persekutuan Solidaritas Perempuan (PSP) mengeluarkan deklarasi politik menuntut segera dibentuknya tim independen untuk menginvestigasi kasus perkosaan yang berlangsung sistemik di sejumlah tempat di Indonesia.

Tuntutan itu tertuang dalam pernyataan politik Solidaritas Perempuan yang dibacakan secara bergantian di hadapan pers oleh sejumlah aktivis perempuan dipimpin Ketua Badan Pelaksana PSP, Tati Krisnawaty di ruang pertemuan Gedung Widya Mandala Yogyakarta. Dalam konferensi pers ini Taty didampingi sejumlah aktivis, termasuk Yeni Rosa Damayanti dan Ati Nurbayati.

Tim independen yang dikehendaki Solidaritas Perempuan, kata Tati Krisnawaty, memang sulit diharapkan komposisi yang ideal. Namun, tim itu setidaknya terdiri atas tiga unsur yakni pemerintah, LSM/NGO serta organisasi perempuan baik organisasi massa maupun organisasi profesi.

Konflik rasial

Berbicara soal konflik rasial, Ariel Heryanto menyatakan, persoalannya memang begitu kompleks dan rumit. Kalaupun dalam kenyataan sehari-hari ada dinamika ketika orang bisa menyapa dengan damai warga negara dari etnis Cina, itu semua masih berkuat pada cap, label dan pagar pri non pri.

Ariel tak menolak bahwa persoalan ras itu memang ada. "Tapi itu sendiri tak menjelaskan pada rakyat, ada apa di balik kerusuhan yang selama ini terjadi," tandas Ariel Heryanto.

Menyangkut kasus perkosaan masal yang dialami per-

empuan dari kelompok etnis minoritas selama terjadinya kerusuhan di Jakarta, Ariel juga menepis jika masalah itu dikatakan sebagai luapan kebencian rasial dari etnis satu kepada etnis lainnya.

"Masalah perkosaan ini tak bisa dijelaskan sebagai persoalan ras. Ini sangat serius sekali menyangkut pemahaman pada masalah gender. Jelas tidak ada penghargaan sama sekali terhadap perempuan, dan itu kejam sekali," paparnya.

Masih berkaitan dengan perkosaan, Solidaritas Perempuan dalam pernyataan politiknya juga menuntut pemerintah membangun fasilitas umum yang menjamin keamanan perempuan dari ancaman tindakan kekerasan, termasuk perkosaan.

Jaminan keamanan itu, menurut Taty, termasuk di antaranya *crisis centre* bagi perempuan serta polisi khusus perempuan.

"Fasilitas umum yang menjamin keamanan bagi perempuan itu misalnya adanya WC umum yang berpenerangan cukup, jalan yang berpenerangan cukup serta bus pengantar bagi buruh yang pulang kerja malam," ujarnya.

Fasilitas semacam itu, kata Taty, minimal merupakan upaya preventif bagi kemungkinan ancaman kekerasan bagi perempuan, termasuk di antaranya ancaman terhadap perkosaan.

Solidaritas Perempuan menilai ada kecenderungan kasus perkosaan di Indonesia tidak mendapat perhatian memadai bahkan tak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dari perangkat perundangan yang ada. "Bagi kami, satu korban pun adalah persoalan serius yang perlu ditangani tuntas," tegas Taty.

Sedangkan Yeni Rosa Damayanti menilai kasus perkosaan di Indonesia sering berkait dengan politik karena dilakukan secara sistematis. Yeni menunjuk beberapa kasus perkosaan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu, di Aceh, Timtim dan Irian Jaya.

Bahkan karena kasus ini sedemikian sistemik, sehingga bukan saja menyangkut aspek sipil, tapi sudah menyangkut tindakan dari kelompok militer untuk mencapai tujuannya.

"Disponsori"

Menjawab pertanyaan Bernas mengapa masalah sentimen rasial ini begitu mudah meledakkan emosi massa, Ariel Her-

yanto meminta masyarakat secara sungguh-sungguh memahami siapa sebenarnya yang menciptakan ideologi dan tradisi berpikir sempit semacam itu.

"Isu ini meledak karena disponsori. Tujuannya supaya isu itu memang dipersalahkan. Kedua, itu masalah tradisi yang sangat panjang," jelasnya.

Sayangnya, kata Ariel, masyarakat plural kita telah biasa percaya pada isu sempit seperti itu. Lebih parah lagi, masyarakat dipaksa meneruskan tradisi itu.

"Jadi ibarat bensin yang disiramkan pada api. Bahkan 32 tahun pola pikir seperti ini intensif ditanamkan. Tapi apakah pemerintah kita betul-betul rasis?" katanya.

Pertanyaan itu dijawabnya sendiri, "Menurut saya, nggak! Pemerintah bisa sangat akrab. Buktinya *you* ketuk pintu mereka, nggak diterima. Tapi coba, mereka (kelompok etnis Cina) masuk, ya masuk. Persoalan utamanya tetap politik, hukum dan ekonomi".

"Dan saya kira persoalan pokoknya tetap ada pada masalah hukum ekonomi dan politik. Ini yang harus betul-betul dibenahi," tandas Ariel. (ff)

JUMAT PAHING, 26 JUNI 1998